



EVALUASI NILAI RB 2017 DAN PERSIAPAN PMPRB 2019 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

MEMBANGUN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN

Rakor 15 April 2019



Setyanta Nugraha

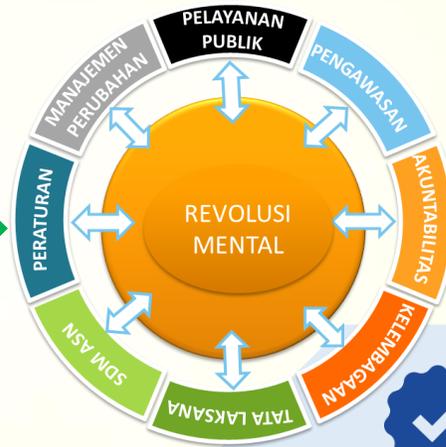
INSPEKTUR UTAMA



MENDORONG PELAKSANAAN

1. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
2. EVALUASI ZONA INTEGRITAS
3. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

3 SASARAN REFORMASI BIROKRASI



Effective



• Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi



• Pemerintah yang efektif dan efisien



• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas



Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah



Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien



Pelayanan Publik Masih Buruk



EFFICIENCY

2



PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY



TRANSPARENCY



EVALUASI

TUJUAN EVALUASI



ASSIST

MEMBERIKAN SARAN PERBAIKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA DAN ZONA INTEGRITAS



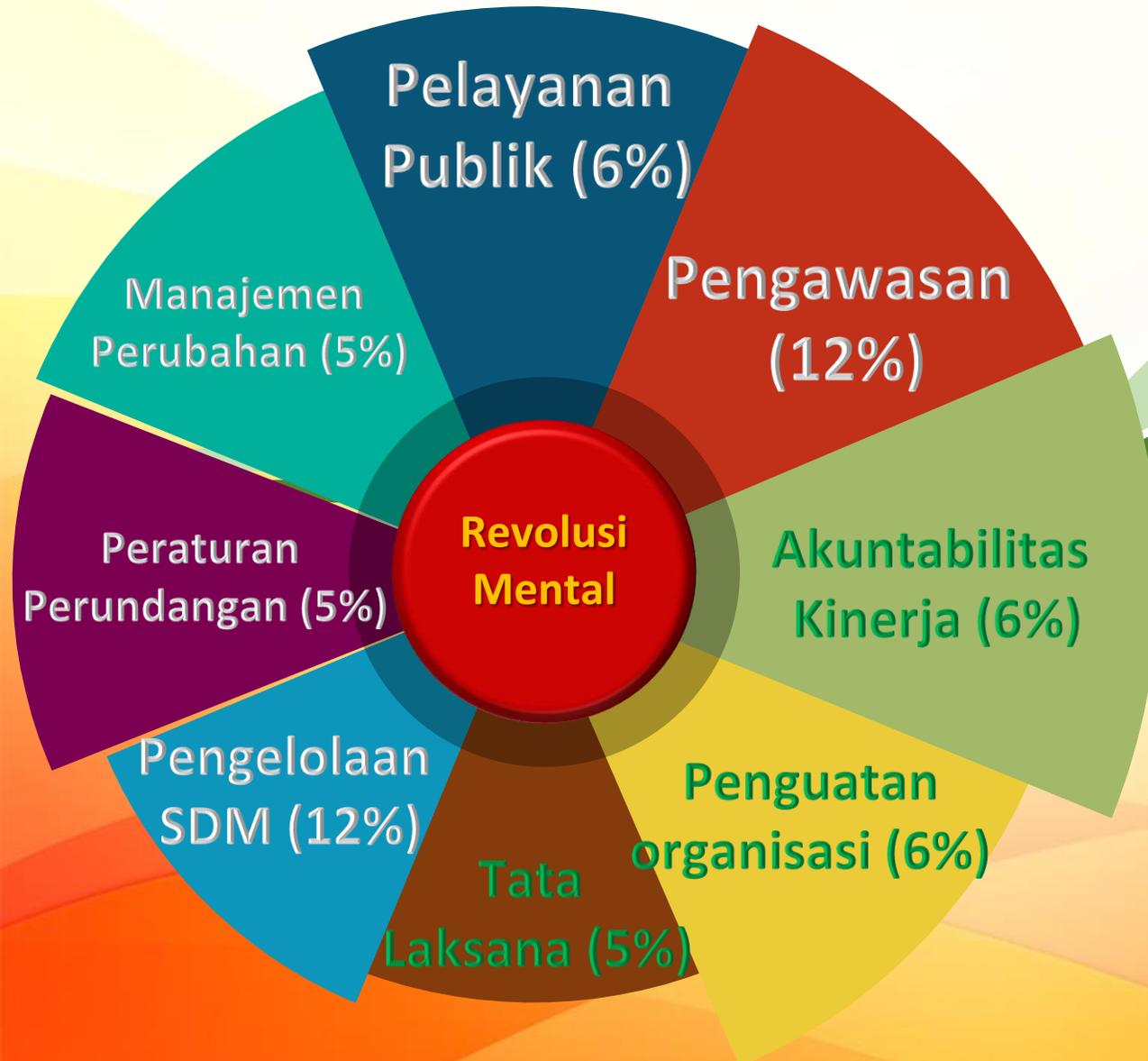
ASSESS

MENILAI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA DAN **ZONA INTEGRITAS**





REFORMASI BIROKRASI



HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%)



Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)



Peningkatan Pelayanan Publik (10%)



KEBERHASILAN RB TIDAK HANYA DILIHAT DARI **UPAYA** TETAPI JUGA **HASIL** YANG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT/STAKEHOLDER (**DPR-RI**)



KATEGORI PENILAIAN



No	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Istimewa
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 50 – 60	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.





HASIL EVALUASI PENGUNGKIT

Nomor : B/160/M.RB.06/2018 tanggal **31 DESEMBER 2018**

Berdasarkan Surat dari **MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,11	4,14 △
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,34	3,44 △
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	3,84
4	Penataan Tata laksana	5,00	3,60	3,38 ▼
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	13,23	13,25 △
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,76	2,77 △
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,81	7,20 ▲
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,67	4,04 ▲
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	41,36	42,06 △

AREA	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2017	▲%	2018
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	0%	3,84
4	Penataan Tata laksana	5,00	3,60	0,94%	3,38 ▼
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,81	0,96%	7,20 ▲
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,67	0,91%	4,04 ▲

Pada komponen PENGUNGKIT Area 4 **PENATAAN TATALAKSANA** terjadi penurunan **0,94%**, pada tahun 2017 sebesar **3,60** menjadi **3,38** pada tahun 2018. Area 3 **PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI** tidak mengalami perubahan.

Kenaikan Signifikan dari tahun sebelumnya terjadi pada Area 7 Penguatan Pengawasan sebesar **0,96%** dan Area 8 **PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK** sebesar **0,91%**.



HASIL EVALUASI ATAS HASIL

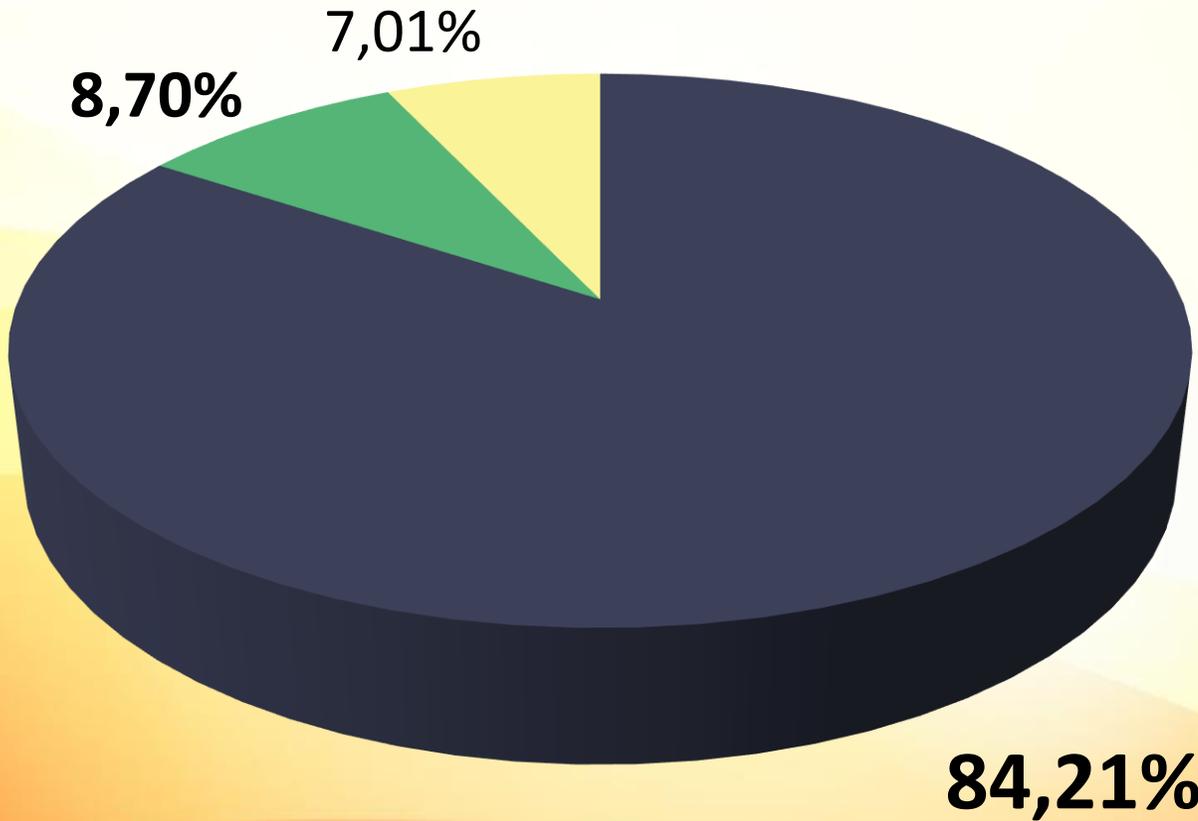
No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
B	Hasil			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	11,42	12,87 ▲
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	9,62	9,23 ▼
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,55	8,55 ▲
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	29,69	30,65
Indeks Reformasi Birokrasi		100	71,05	72,71

Parameter Unsur Penilaian:

- ❖ Opini BPK (WTP)
- ❖ Maturitas SPIP (Level3)
- ❖ Maturitas IACM (Level 3)
- ❖ Nilai Akuntabilitas/LAK (B)
- ❖ Maturitas ULP (Merah)
- ❖ Maturitas SPBE (1,6)
- ❖ Kepatuhan LHKPN (80 %)
- ❖ Kepatuhan LHKASN (80%)
- ❖ Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM
- ❖ Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
- ❖ Pengelolaan Gratifikasi
- ❖ Pengelolaan WBS
- ❖ Penanganan Col



SURVEY INTERNAL



Mayoritas telah memahami tugas fungsi yang harus mereka laksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

- Memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya
- Memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya
- Belum memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilannya



14 Poin PENYEMPURNAAN

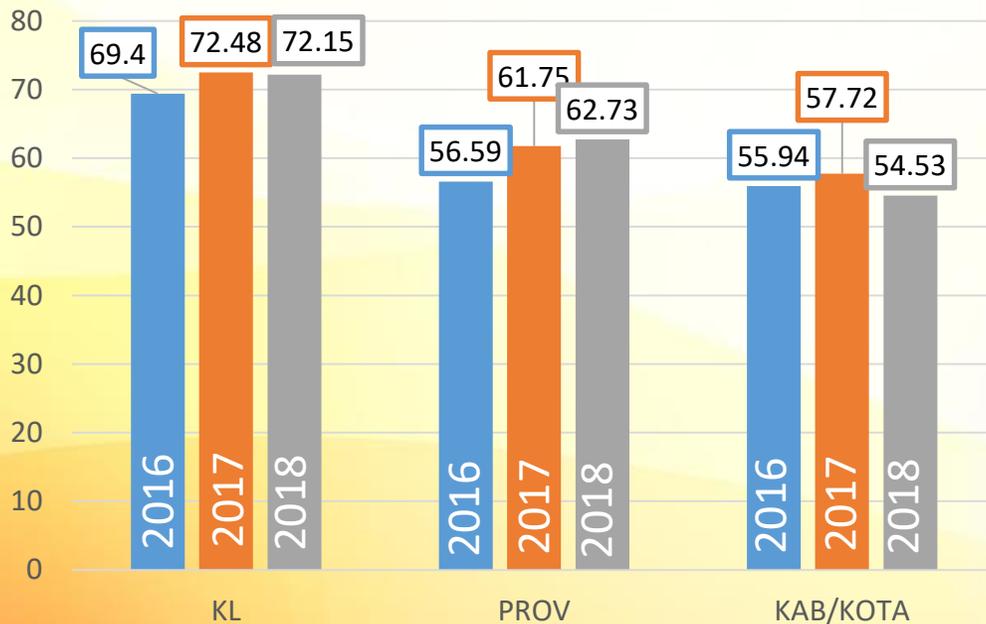


1. Mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh unit kerja.
2. Konsistensi penerapan peran pimpinan sebagai role model dan penguatan agen perubahan, menetapkan target terukur dan melakukan monitoring secara berkala.
3. mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, perubahan *mind set* aparatur berdasarkan nilai organisasi, perubahan apa yang ingin dicapai dan rencana tindak lanjutnya.
4. Memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai akan arti pentingnya uraian tugas dan jabatan serta tugas fungsi serta ukuran keberhasilan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud.
5. Penurunan indeks integritas organisasi Setjen dan BK DPR tahun 2018 dibandingkan dengan nilai tahun 2017 maka perlu memperbaiki sistem integritas yang telah dibangun terutama pada budaya organisasi anti korupsi secara berkala
6. Hasil survei terhadap indeks persepsi anti korupsi terhadap pegawai Setjen dan BK DPR RI menunjukkan gambaran yang belum memuaskan. Oleh sebab itu, perlu diperbaiki sistem integritas dalam pemberian pelayanan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
7. Dengan ditetapkannya PP No. 49 Th. 2018 tentang PPPK perlu segera menata pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, sehingga seluruh pegawai dapat diklasifikasikan pada jenis pegawai yang dikenal dengan UU ASN atau PNS dan PPPK
8. Merencanakan kebutuhan pegawai dengan memperhatikan bentuk organisasi yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif yang dapat diperoleh melalui hasil evaluasi kelembagaan secara berkala
9. Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantuan dan pengukuran kerja tersebut secara elektronik diseluruh level organisasi secara berkala, melakukan penyesuaian antara kinerja yang akan dicapai dengan anggaran *real*, serta melakukan perbaikan atas hasil pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya
10. Menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan menetapkan hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja yang didasarkan kepada kinerja
11. Meningkatkan penerapan e-government, tugas layanan koordinasi dengan stakeholder Setjen dan BK DPR dan mempercepat penerapan SPBE di bidang kearsipan yang berbasis elektronik yang terintegrasi
12. Diperlukan peningkatan maturitas SPIP dan kapasitas pengawasan intern dengan penilaian tingkat kapabilitas Inspektorat Utama (IACM) yang saat ini masih menuju level 3
13. Evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi, implementasi kebijakan *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut
14. Melanjutkan pembangunan unit kerja yang akan diusulkan menjadi unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM) dan setelah dilakukan evaluasi oleh APIP bagi yang lolos berdasarkan standar penilaian dapat diusulkan pada Tim Penilai Nasional dalam hal ini Kementerian PAN-RB

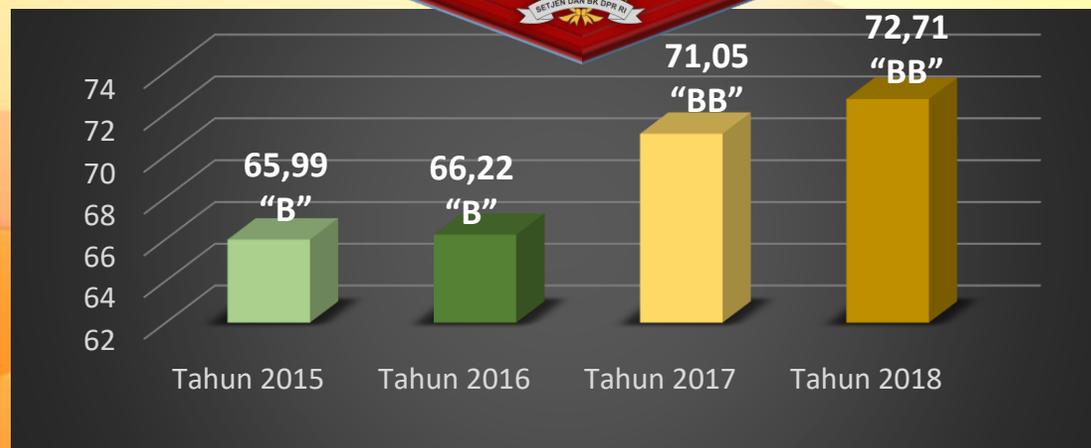
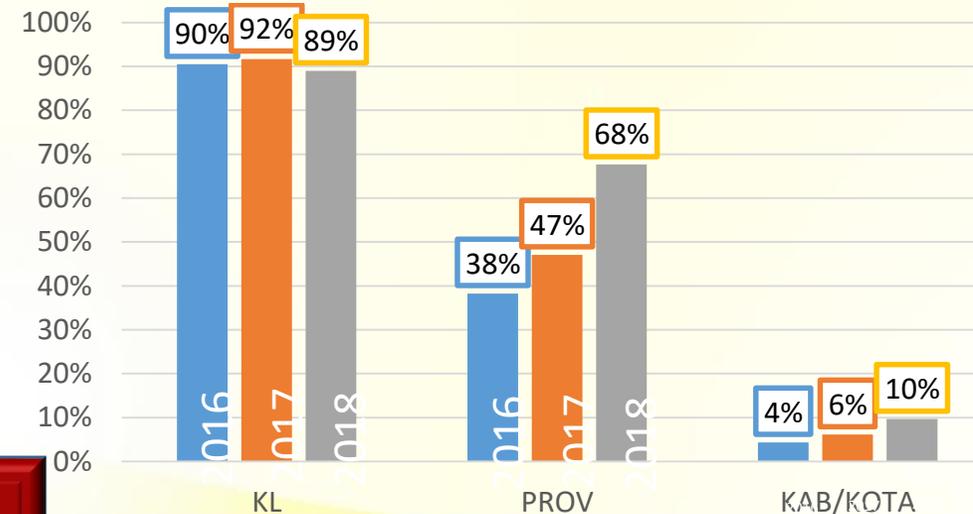


Tren perkembangan Reformasi Birokrasi

NILAI RATA-RATA NASIONAL



IP DENGAN RB BAIK





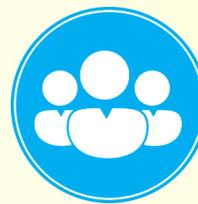
HASIL SURVEI REFORMASI BIROKRASI

Tahun 2018

Quesioner dibangun bersama antara

Kementerian PAN RB, KPK dan BPS.

Survey dilakukan oleh **BPS.**

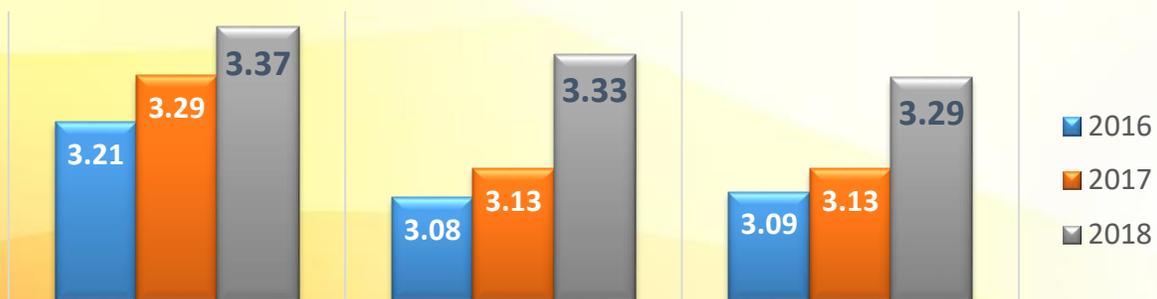


**+/- 22.000
responden**



**969
Unit Kerja Layanan**

INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK

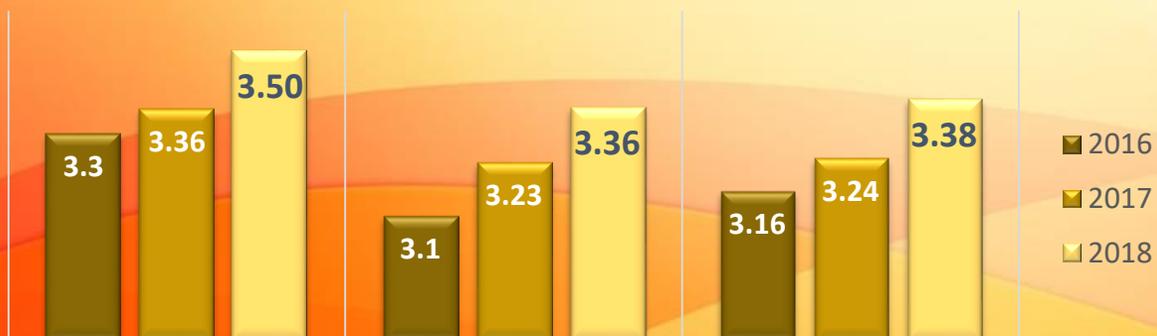


Kementerian / Lembaga

Provinsi

Kab. / Kota

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI



Kementerian / Lembaga

Provinsi

Kab. / Kota

**INDEKS KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK**

3,43

(DALAM SKALA 4)

**INDEKS PERSEPSI
ANTI KORUPSI**

3,57

(DALAM SKALA 4)



PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Road Map Reformasi Birokrasi

merupakan strategi tingkat nasional serta kerangka acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi.



Saat ini Road Map Reformasi Birokrasi sedang dalam proses penyusunan, dengan bantuan dari berbagai akademisi nasional dan internasional

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

berisi prioritas RB nasional, tahapan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, serta kolaborasi antar berbagai instansi pemerintah



01

Menetapkan
Tujuan/Sasaran
Prioritas yang
Jelas (*Outcomes*)

02

Menetapkan ukuran
Kinerja
(*performance
indicators*)

03

Menetapkan
Target

04

Mengaitkan Tujuan
dengan Program
dan Kegiatan
(*Program follow
Result*)

Perencanaan Berbasis Kinerja

Pemerintahan
yang Berorientasi
Kegiatan

GOOD
GOVERNANCE/O
RIENTASI HASIL

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran)

Merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)



ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI

Money Follow Program

Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil)

Stop Pemborosan Anggaran

Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.

e-Government

Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.



Fokus Kinerja, bukan SPJ

ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ.

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting.

Anggaran digunakan hanya untuk membiayai **program/kegiatan prioritas** yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Anggaran yang digunakan menghasilkan **manfaat besar untuk masyarakat.**



PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI



UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

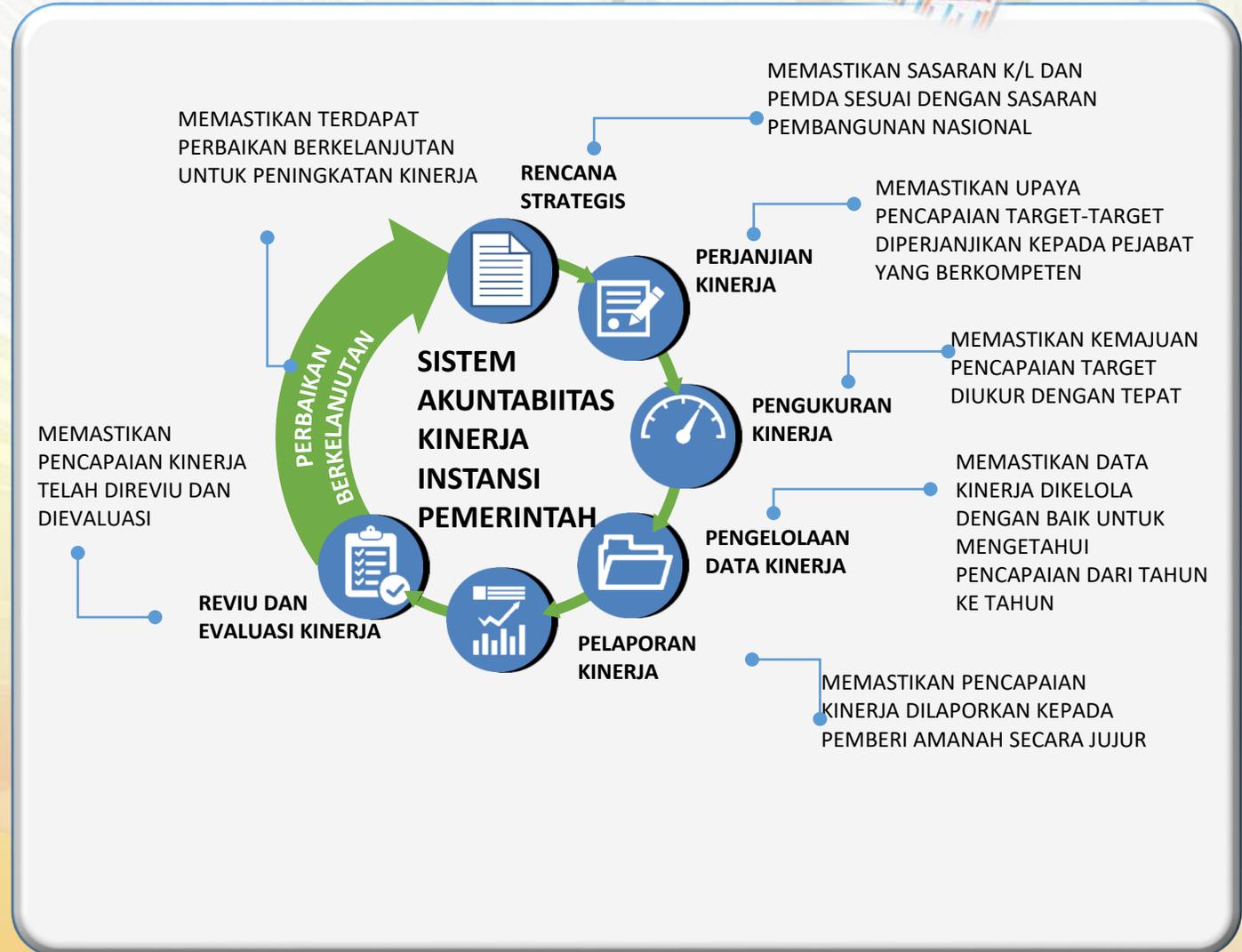
- Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil
- Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil





ANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK MENDORONG EFISIENSI DAN BUDGET SAVING

LATAR BELAKANG

Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumberdaya

Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan

Budget Reform:

Dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada Dewan

Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja (Super Budgeting)

Budget Savings

Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran



EFISIENSI BIROKRASI MELALUI SAKIP

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATEGORI		Kementerian/ Lembaga				Pemerintah Provinsi				Kabupaten / Kota			
Kategori	Range Nilai	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
AA	90-100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A	80-90	4	4	6	5	2	3	4	4	1	2	2	9
BB	70-80	21	27	26	31	7	7	6	6	7	10	30	40
B	60-70	36	37	40	42	8	12	19	18	31	57	139	185
CC	50-60	16	11	7	3	13	10	5	5	172	199	174	162
C	30-50	0	3	3	2	3	2	0	0	239	193	135	97
D	0-30	0	0	0	0	1	0	0	0	14	14	3	5

KATEGORI		EFISIEN
Kategori	Range Nilai	
AA	90-100	↑ BOROS
A	80-90	
BB	70-80	
B	60-70	
CC	50-60	
C	30-50	
D	0-30	

Menggambarkan kemampuan instansi dalam:

- Mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran;
- Menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas;
- Menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung **bagi pencapaian sasaran pembangunan.**



Nilai Efisiensi 2018



± 35 T
Dari 25 Provinsi

± 30,1 T
Dari 215 Kab/Kota

± 65,1 T
TOTAL

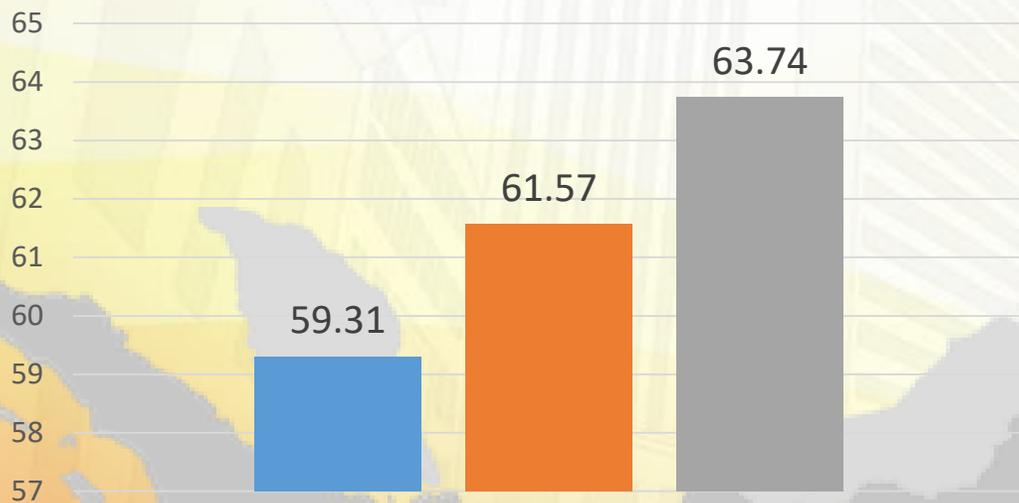
EFISIENSI DISEBABKAN OLEH:

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. *Re-focusing* (pengurangan) Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya *cross-cutting* program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi.

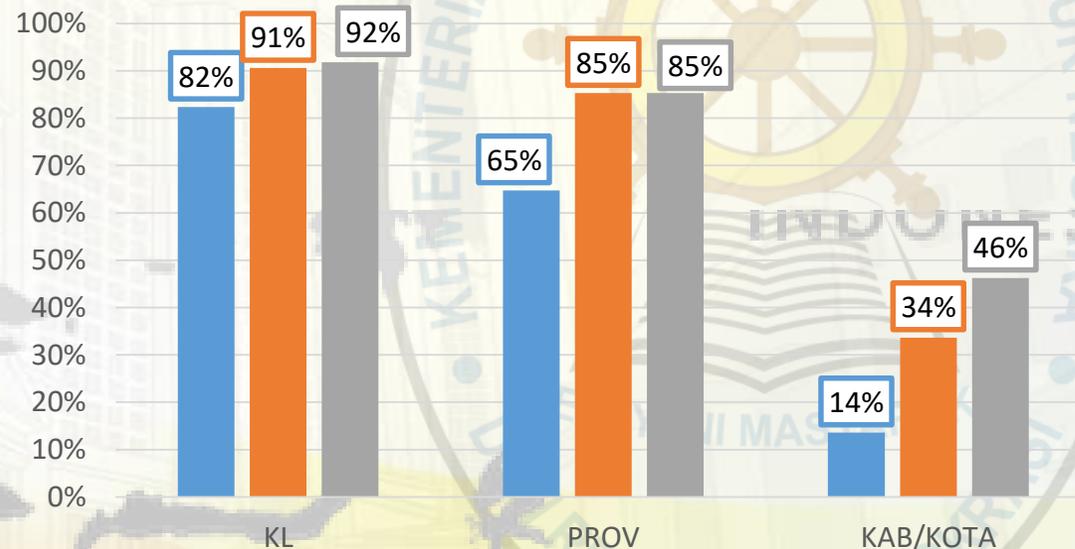


TREN PERKEMBANGAN AKUNTABILITAS KINERJA

NILAI RATA-RATA NASIONAL



IP DENGAN RB BAIK



SUMATERA

KALIMANTAN

SULAWESI

IRIAN JAYA

JAWA



ANGGARAN BERBASIS KINERJA



PRIORITAS
DAN
SASARAN STRATEGIS



PROGRAM
KEGIATAN



ANGGARAN

Program Follow Result

Money Follow Program

Pemilihan Program dan Kegiatan harus sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan

Besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan

**TIDAK BOLEH ADA SATU
RUPIAH PUN ANGGARAN
NEGARA YANG TIDAK
ADA**

**HASIL/MANFAATNYA
UNTUK MASYARAKAT**





PENYELARASAN SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN INFORMASI KINERJA

PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Tahun 2017 telah dilakukan penyelarasan di seluruh Kementerian/Lembaga melalui PP 17/2017 dengan memanfaatkan Aplikasi Krisna. Untuk pemerintah daerah sedang dilakukan pendampingan **penerapan aplikasi SEPAK@T kepada** sekitar 21 Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota bersama Kemen PANRB, BPPT, serta BPKP dan akan bertambah lagi sekitar 370 Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PUSAT



RUANG LINGKUP

1. Penyamaan arsitektur kinerja
2. Penyamaan istilah dan definisi
3. Penyamaan format
4. Integrasi sistem aplikasi Perencanaan dan Penganggaran, kemudahan implementasi aplikasi bagi pengguna:
 - pengurangan duplikasi proses input dan pengolahan data;
 - kecepatan dan keterandalan data dan informasi.
5. Integrasi dilakukan pada tahap perencanaan, monev pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi

PEMERINTAH DAERAH



DAMPAK UTAMA

1. Meningkatnya **efektivitas** penggunaan anggaran dan **fokus** pada sasaran pembangunan nasional **dan pembangunan daerah**.
2. Meningkatnya **keselarasan (program)** antara yang direncanakan dengan yang dianggarkan.
3. Setiap sasaran pembangunan nasional **dan pembangunan daerah terkawal** secara jelas pada **kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah**.
4. Mencegah program/kegiatan "**Siluman**".



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM)

di Unit Kerja
Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM)



2019 
LELANG

24

SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

Unit Layanan Persidangan
Biro Persidangan II



1. Biro/Pusat
2.
3.
4.
5.

ZONA INTEGRITAS

MEWUJUDKAN UNIT PELAYANAN YANG **BERKINERJA TINGGI** DAN **BERINTEGRITAS**



5 Langkah Utama Membangun ZI



KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama



KEMUDAHAN PELAYANAN

Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat Hospitality untuk kepuasan publik (Dewan)



PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT (Dewan)

Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat (Dewan) sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut



MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya



MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat (Dewan)



KEGIATAN PMPRB 2019

- Verifikasi dan kelengkapan Data/Eviden Penilaian.
- Januari- 30 April 2019

PANEL I
6 Mei 2019

- Konsensus Panel Asesor:
Penetapan Nilai Pelaksanaan RB & Rencana Aksi Tindak Lanjut

PANEL II
16 Mei 2019

- Persetujuan nilai Institusi dan Submit Nilai Pelaksanaan RB Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DR RI ke KemenPAN RB

PANEL III
27 Mei 2019

Setiap Eselon I mengisi PMPRB Online





ASESOR DAN ASISTEN ASESOR PMPRB 2019

No	Area Perubahan	Asesor	Asisten Asesor	Keterangan
1	Manajemen Perubahan	Nunu Nugraha	Yuni Rahayu, Dedi S	Hasnelson, Dwi Nartami
2	Penataan Perundang-undangan	Indra Pahlevi	Afniwati, nadya Sucianti	Deny, Taryono
3	Penguatan Organisasi	Rahmat Budiadji	Koko Surya	Enden, Santi, Nurhariyani, Heru
4	Penataan Tatalaksana		Santi Dona	
5	Manajemen ASN			
6	Penguatan Akuntabilitas	Rahmat Budiadji	Dedy Bagus	Een, Ricky
7	Penguatan Pengawasan	Dewi Barliana	Timbang S, Suretianto	Deni W, Citra
8	Pelayanan Publik	Djaka Dwi Winarko	Isnu P, Erna A	Mulyati, Tika

Terima Kasih



ittama.dpr.go.id